



# Pemkot Segera Remajakan Kader PKSM

## ● Kemensos RI Galakkan Program Sertifikasi

YOGYA, TRIBUN - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta tengah mengupayakan proses kaderisasi Pekerja Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PKSM). Hal tersebut karena para pekerja sosial yang ada telah berusia lanjut dan perlu regenerasi untuk melanjutkan realisasi berbagai program pengentasan masalah sosial.

"Kami akan bekerjasama dengan RT, RW dan kelurahan memulai pendataan generasi muda yang potensial dan berjiwa sosial tinggi. Mereka akan direkrut sebagai pekerja sosial," ucap Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Hadi Muhtar dijumpai di sela acara Rakorbang Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Regional III di Hotel Saphir, Jumat (5/4).

Disebutkan bahwa, sejauh ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta telah memiliki sekitar 700 kader-kader sosial di masing-masing RT dan RW. Para kader tersebut ditujukan untuk membantu penanganan masalah sosial para pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS), kalangan disabilitas dan penyandang masalah sosial agar tidak terpinggirkan.

Sekjen Kementerian Sosial RI, Toto Utomo Budi Santoso memaparkan, upaya pengembangan tersebut sangat penting mengingat minimnya penanganan permasalahan sosial di Indonesia. Data Kemensos RI menyebutkan, dari total 15,5 juta keluarga penyandang permasalahan sosial pada 2012, hanya sekitar 8 persennya yang sudah tertangani.

Satu di antaranya penyebab minimnya penanganan masalah sosial tersebut karena minimnya jumlah Pekerja Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PKSM) sebagai penjangkau masyarakat. Menurut Toto, idealnya setiap PKSM mengampu 100 keluarga penyandang masalah sosial. Artinya, dibutuhkan sedikitnya, 155 ribu pekerja sosial yang aktif menggalakkan berbagai program pengentasan masalah sosial.

"Kenyataannya, hanya terdapat 15.522 pekerja sosial di Indonesia. Masih kurang sebanyak 139.478 pekerja sosial," ucap Toto di hadapan Wakil Gubernur DIY, Pakualam IX dan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti.

Kemensos RI tengah menggalakkan program sertifikasi untuk me-

ningkatkan kompetensi PKSM dalam menangani permasalahan sosial masyarakat. Nantinya, para pekerja sosial akan memiliki sertifikasi yang setara dengan dokter maupun profesi lainnya. Proses sertifikasi juga ditujukan bagi lembaga-lembaga sosial. "Jika ingin membuat pantipun, tidak asal-asalan," tandasnya.

Untuk merealisasikannya, Kemensos RI telah menyediakan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) yang tersebar di enam wilayah yakni Yogyakarta, Padang, Makassar, Banjarmasin, Bandung dan Papua.

"RUU praktik pekerja sosial juga tengah diajukan. Di dalamnya memberikan mandat tentang peran dan kinerja pekerja sosial, termasuk sertifikasi, asosiasi dan lain sebagainya," pungkasnya. (esa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005